

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

v

DAFTAR ISI

vii

BAB 1 PENERAPAN TEORI NEGARA HUKUM PADA PENELITIAN DISERTASI DAN TESIS

A. Pengertian Teori Negara Hukum	1
B. Pengembang Teori Negara Hukum	6
C. Penerapan Teori Negara Hukum dalam Penelitian Disertasi	11
1. Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristik, Pragmatis	12
2. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia	14
3. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah Berdasarkan Penghormatan terhadap Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	15
4. Saling Mengimbangi dan Saling Kontrol antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang	17

5. Pengaturan Prinsip Kesetaraan antara Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia	19
6. Penempatan dan Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri	21
7. Perlindungan Hukum untuk Pekerja Perempuan dalam Hubungan Industrial	24
8. Kebebasan Bertindak Kepala Daerah di Bidang Perizinan dalam Perspektif Perkembangan Hukum Administrasi	26
9. Pemutusan Kerja di Indonesia: Studi Mengenai Peraturan Perundang-undangan, Putusan P4D dan Putusan P4P serta Putusan Pengadilan (1950-2009)	28
10. Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Pemerintahan dalam Maladministrasi	30
11. Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi	32
12. Reaktualisasi Model Formulasi Norma Hukum Berbasis Asas Kejujuran Konstitusi Kerajaan-kerajaan di Nusantara ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	34
13. Transformasi Nilai-nilai Kearifan Lokal <i>Krik Slamet</i> Masyarakat Sumbawa dalam Upaya Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Penyelesaian Konflik Pengelolaan Lar	37
14. Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945	39
15. Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum	40
16. Pemakzulan Presiden di Indonesia	41
17. Hukum yang Berkenaan dengan Tanah dalam Kosmologi Masyarakat Osing: Suatu Studi Kasus tentang Proses Pencapaian Harmoni dalam Perubahan di Desa Kemiren Banyuwangi	43

18. Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka	44
D. Penerapan Teori Negara Hukum dalam Penelitian Tesis	49
1. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di Provinsi Bali)	49
2. Implementasi Kekuasaan Pemerintahan oleh Presiden sesudah Perubahan UUD 1945	51
3. Kebijakan Legislatif dalam Rangka Perlindungan Ideologi dan Konstitusi Negara dengan Hukum Pidana	53

BAB 2 IMPLEMENTASI TEORI INVESTASI PADA PENELITIAN DISERTASI DAN TESIS

A. Pengertian Teori Investasi	55
B. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis tentang Investasi	59
C. Teori-teori yang Menganalisis tentang Investasi	61
D. Penerapan Teori Investasi dalam Penelitian Disertasi	74
1. Praktik Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) pada <i>Foreign Direct Investment</i> yang Berbentuk <i>Subsidiary Company</i> (PT PMA) di Indonesia (Suatu Kajian tentang Kebijakan <i>Anti Tax Avoidance</i>)	74
2. Prinsip Hukum Investasi Pertambangan Umum	76
3. Kepastian Hukum dalam Investasi Langsung di Indonesia	78
4. Perpanjangan Hak Guna Bangunan Bagi Perseroan Terbatas Ditinjau dari Prinsip Kepastian Hukum, Keadilan, dan Investasi Berkelanjutan Menuju Kesejahteraan Rakyat	82
5. Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan	84
6. Studi Mengenai Perbedaan Struktur Modal Perusahaan Penanaman Modal Asing dengan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang <i>Go Public</i> di Pasar Modal Indonesia (Perspektif Teori Dasar Struktur Modal, Teori Keagenan dan Teori Kontingensi dalam Upaya Mengoptimalkan Struktur Modal Perusahaan)	86

7. Penyebaran Kepemilikan Saham Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Menciptakan Perusahaan yang Sehat dan Efisien	88
8. Kajian Hukum atas Insider Trading di Pasar Modal Suatu Antisipasi terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia (Satu Telaah Singkat)	89
9. Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan dalam Kegiatan Investasi Pertambangan	90
E. Penerapan Teori Investasi dalam Penelitian Tesis	93
1. Pengembangan Kawasan Industri dalam Meningkatkan Minat Investasi di Kota Semarang	93
2. Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Upaya Peningkatan Iklim Investasi di Era Otonomi Daerah	98
3. Peran Pemerintah Provinsi Papua terhadap Kebijakan Investasi dalam Rangka Otonomi Khusus	100
4. Perlindungan Hukum Bagi Investor terhadap Tindakan <i>Tippee</i> yang Melakukan <i>Insider Trading</i> dalam Perdagangan Saham	102

BAB 3 PENERAPAN TEORI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PENELITIAN DISERTASI DAN TESIS

A. Pengertian Teori <i>Corporate Social Responsibility</i>	105
B. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis tentang <i>Corporate Social Responsibility</i>	110
C. Teori-teori yang Menganalisis tentang <i>Corporate Social Responsibility</i>	114
D. Penerapan Teori <i>Corporate Social Responsibility</i> pada Penelitian Disertasi	119
1. <i>A Study of Current Practice of Corporate Social Responsibility (CSR) and an Examination of The Relationship Between CSR and Financial Performance Using Structural Equation Modelling (SEM)</i>	119
2. <i>Corporate Social Responsibility from an Emerging Market Perspective: Evidences from the Indian Pharmaceutical Industry Corporate Social Responsibility from an Emerging Market Perspective: Evidences from the Indian Pharmaceutical Industry</i>	120

3.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat	122
4.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan <i>Corporate Social Responsibility</i> pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara	124
E.	Penerapan Teori <i>Corporate Social Responsibility</i> pada Penelitian Tesis	127
1.	Pengembangan Tanggung Jawab Sosial Perseroan (<i>Corporate Social Responsibility</i>) Dikaitkan dengan Konsep Tri Hita Karana (Studi di Provinsi Bali)	127
2.	Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Sebagai Modal Sosial pada PT Newmont	129
3.	Pengaturan Kewajiban CSR pada Perusahaan Perseroan Terbatas serta Bentuk-bentuk Kegiatannya Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	131
4.	Perbandingan Pengaturan tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> antara Indonesia dengan Cina dalam Upaya Perwujudan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di Indonesia	132
5.	<i>Corporate Social Responsibility</i> Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	134
BAB 4	TEORI PEMIDANAAN (<i>THEORY OF PUNISHMENT</i>)	
A.	Pengertian Teori Pidana	137
B.	Teori-teori yang Menganalisis tentang Pidana	140
C.	Penerapan Teori Pidana dalam Penelitian Disertasi	145
1.	Lembaga Pidana Bersyarat	146
2.	Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi	149
3.	Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Terkait dengan Sertifikasi Tanaman Pangan Tanpa Izin	152
4.	Kebijakan Formulasi terhadap Tindak Pidana Desersi yang Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer	156

5.	Formulasi Rumusan Tindak Pidana Penerima Hasil Korupsi dalam Perspektif Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia	160
6.	Pergeseran Kebijakan Hukum Pidana tentang Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	163
7.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Hukum Artifisial	165
8.	Kebijakan Formulasi tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen	166
9.	Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial	168
10.	Konsep Pemidanaan dalam Islam dan Kemungkinan Implementasinya di Negara Hukum Indonesia	169
D.	Penerapan Teori Pemidanaan dalam Penelitian Tesis	172
1.	Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	172
2.	Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perambahan Hutan di Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut Provinsi Sumatera Utara	174
3.	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Biaro (Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan tentang Perlindungan Negara)	176
4.	Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan dalam Upaya Penanganan Masalah Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi	178
5.	Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit (<i>Credit Card</i>)	179
6.	Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kuta dengan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian	180
7.	Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Denpasar)	182

BAB 5	TEORI KRIMINOLOGI (CRIMINOLOGY THEORY)	
A.	Pengertian Teori Kriminologi	185
B.	Teori-teori yang Menganalisis tentang Kriminologi	187
C.	Penerapan Teori Kriminologi pada Penelitian Disertasi	195
1.	Statistik Kriminal: Sebagai Konstruksi Sosial, Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya Suatu Studi Kriminologi Statistik Kriminal	195
2.	Model Alternatif Penyelesaian Konflik Komunal (Studi di Desa Ketara Kabupaten Lombok Tengah di Desa Ngali dan Renda Kabupaten Bima Provinsi Nusa)	197
3.	Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Pornografi yang Melibatkan Anak	200
4.	Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan dalam Peradilan Pidana di Indonesia	201
5.	Psikoterapi Islami dalam Mengatasi Ketergantungan Narkoba di Pondok Pesantren Inabah Surabaya	204
D.	Penerapan Teori Kriminologi pada Penelitian Tesis	206
1.	Urgensi Pidana Mati terhadap Pelaku Korupsi	206
2.	Kejahatan Korporasi dalam Kasus Luapan Lumpur Lapindo Brantas Incorporated	207
3.	Pidana Kerja Sosial dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional	209
4.	Kebijakan Penal untuk Kejahatan dalam Bidang Keuangan	210
5.	Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian	212
BAB 6	PENERAPAN TEORI PEMBUKTIAN DALAM PENELITIAN DISERTASI DAN TESIS	
A.	Pengertian Teori Pembuktian	215
B.	Fungsi Teori Pembuktian	218
C.	Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis tentang Pembuktian	219
D.	Jenis-jenis Alat Bukti	220
E.	Teori-teori yang Menganalisis tentang Pembuktian	224

F. Penerapan Teori Pembuktian dalam Penelitian Disertasi	231
1. Eksekusi Putusan Serta Merta dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Dikaitkan pada Asas Kepastian Hukum sebagai Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia	232
2. Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003	235
3. Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	237
4. Aspek Hukum Pembuktian Sebagai Anak Luar Kawin dari Pewarisan pada Perkawinan yang tidak Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	238
5. Studi Sistem Hukum Pembuktian di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	239
6. Aspek Hukum Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta	241
7. Kecermatan Pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris	242
8. Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar)	244
G. Penerapan Teori Pembuktian dalam Penelitian Tesis	245
1. Keterangan Hak Waris di Bawah Tangan oleh Notaris Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Hukum Pembuktian Perdata (Studi terhadap Notaris di Kota Pontianak)	245
2. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum dalam Pembuktian Orisinalitas Sengketa Hak Cipta Logo "Natasha" (Studi Kasus Putusan Sengketa Seni Logo Natasha No.02/Haki/C/2009/PN.Smg)	247

3. Eksplorasi Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Terkait dengan Aspek Hukum Pembuktian	249
4. Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia	250
5. Peranan Notaris dalam Proses Peradilan Kaitannya dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan di Kota Surakarta	251

BAB 7 TEORI-TEORI YANG MENGANALISIS TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Teori Hak Asasi Manusia	255
B. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologi Hak Asasi Manusia	260
C. Penggolongan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia	262
D. Teori-teori yang Menganalisis tentang Hak Asasi Manusia	274
E. Penerapan Teori Hak Asasi dalam Penelitian Disertasi	280
1. Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945	280
2. Pemberlakuan Asas Retroaktif pada Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat dalam Pengadilan Ham Ad Hoc di Indonesia	282
3. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Berbagai Kasus di Indonesia Periode Tahun 1986-2010)	283
4. Formulasi Kebijakan Perlindungan Hukum Pembantu Rumah Tangga Berbasis Konstitusional	285
5. Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) dari Perspektif Hak Asasi Manusia	288
6. Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia	289

7. Revitalisasi Peradilan Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Delik Adat pada Masyarakat Hukum Adat Papua	291
8. Dinamika Sanksi Hukum Adat dalam Perkawinan Antar-Wangsa di Bali (Perspektif HAM)	295
9. Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan	296
F. Penerapan Teori HAM dalam Penelitian Tesis	300
1. Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Konsep <i>Good Governance</i> di Indonesia	300
2. Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor-Leste dalam Menangani Masalah Pelanggaran HAM di Timor-Timur	301
3. Perlindungan Saksi dalam Peradilan Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur	302
4. Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000: Studi Kasus Pelanggaran HAM di Timor-Timur pada Bulan April-September 1999	304
DAFTAR PUSTAKA	307
BIODATA PENULIS	321